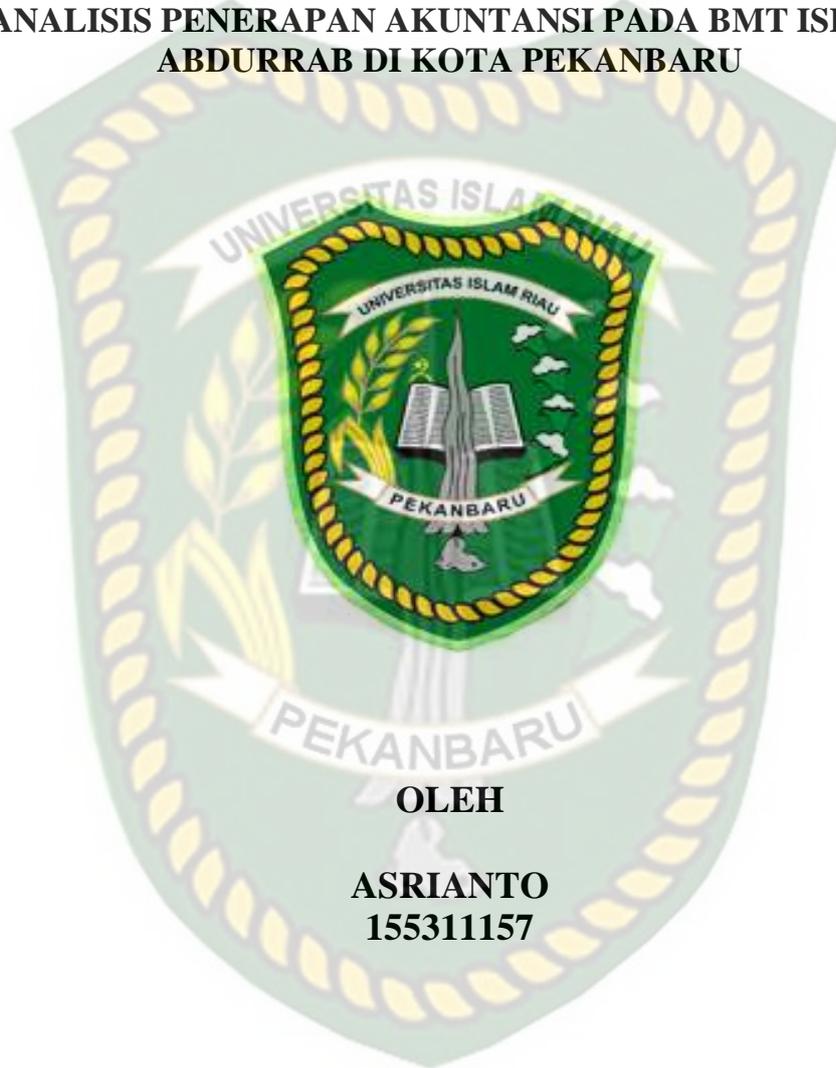


SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BMT ISLAM
ABDURRAB DI KOTA PEKANBARU**



OLEH

**ASRIANTO
155311157**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI – S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Asrianto
NPM : 155311157
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada BMT Islam Abdurrah di Kota Pekanbaru

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 133 Perhentian Marpoyan

Tel. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru - 28284

Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi

Nama : Asrianto
Npm : 155311157
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi pada BMT Islam Abdurrah di Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA
2. Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA

Tanda Tangan

()
()

Pembimbing



Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui Ketua Program Akuntansi S1



DR.Hj.Siska,SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 133 Perhentian Marpoyan

Tel. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru - 28284

NOTULEN SEMINAR HASIL

1. NAMA MAHASISWA : **asrianto**
2. NPM : 15531157
3. HARI/TANGGAL : Rabu, 07 april 2022
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pada BMT Islam Abdurrah di Kota Pekanbaru

Sidang dibuka oleh **Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

NO	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Halimahtussakdiah. SE., M.Ak., Ak., CA <ul style="list-style-type: none">• Penjelasan pada piutang itu tidak usah dipisah - pisahkan langsung saja pada pembahasan Piutangnya sampai ke saran anda bagaimana yang seharusnya di lakukan sesuai akuntansi yang berterima umum.	<ul style="list-style-type: none">• Sudah diperbaiki	Terlihat pada BAB IV	
2	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak.,CA <ul style="list-style-type: none">• coba diperhatikan pedoman penulisan abstrak	<ul style="list-style-type: none">• Sudah diperbaiki	Terlihat pada Abstrak	

Mengetahui

Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui

Alfurkaniati, SE., M.si., AK., CA
Pembimbing



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023

NPM : 155311157
 Nama Mahasiswa : ASRIANTO
 Dosen Pembimbing : 1. ALFURKANIATI,SE.,M.SI.,AK.,CA
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Akuntansi Pada BMT Islam Abdurrah di Kota Pekanbaru
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Accounting Implementation at BMT Islam Abdurrah in Pekanbaru City
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	11-09-2021	Rumusan masalah, kegiatan utama koperasi		
		Jelaskan apa itu murabahah dan mudorabah		
		Pendapatan tahun pendapatan bagi hasil		
		Perlengkapan dibebankan satu tahun		
2	1 - 10 - 2021	Acc seminar		
3	25 - 02 - 2022	Bab IV, Tambahkan pembahasan dari setiap masalah yang diangkat		
4	02 - 03 - 2022	Acc seminar		

Pekanbaru, 16 Agustus 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi


 (Siska, SE., M.Si., Ak., CA)



MTG2NZEXMTAZ

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan koplannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

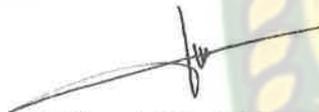
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 491/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 05 April 2022, Maka pada Hari Rabu 06 April 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

1. Nama : Asrianto
2. NPM : 155311157
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Bmt Islam Abdurrah di Kota Pekanbaru.
5. Tanggal ujian : 06 April 2022
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau FEB UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **Lulus (B-) 70,5**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

- Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
- Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA
- Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

()
()
()

Notulen

- Nina Nursida, SE., M.Acc

()

Pekanbaru, 06 April 2022

Mengetahui
Dekan,




Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 491 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

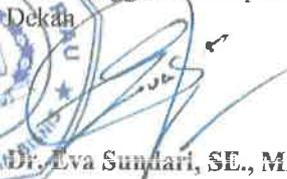
- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Asrianto
N P M : 155311157
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Bmt Islam Abdurrah di Kota Pekanbaru.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Emkhad Arief, SE., M.Si, Ak	Asisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Halimahtussakdiah, SE...,M.Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Nina Nursida, SE.,M.Acc	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 06 April 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

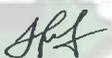
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Asrianto
NPM : 155311157
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Bmt Islam Abdurrah di Kota Pekanbaru.
Hari/Tanggal : Rabu 06 April 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **69**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 06 April 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Asrianto
NPM : 155311157
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pada BMT Islam Abdurrab di Kota Pekanbaru.
Pembimbing : 1. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 10 November 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Anggota	2. 
3.	Efi Susanti, SE., M.Acc	Anggota	3. 

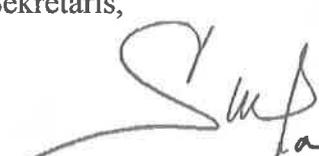
*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 10 November 2021
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 510/Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca** : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 0000-00-00 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang** : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UJR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
N a m a : ASRIANTO
N P M : 155311157
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAH DESA DI NAGARI SILAYANG KEC.MT.SELATAN KAB.PASAMAN
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 09 Agustus 2022



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marboyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674034 Email: info@uisr.ac.id Website: www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ASRIANTO
NPM : 155311157
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BMT ISLAM
ABDURRAB DI KOTA PEKANBARU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 17 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Setia Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BMT ISLAM ABDURRAB DI KOTA PEKANBARU

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dalam dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Univesitas batal saya terima.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Pernyataan memberi pernyataan,



Asrianto

NPM: 155311157

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pada BMT Islam Abdurrab Pekanbaru dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK Syariah). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian di BMT Islam Abdurrab Pekanbaru maka analisis data yang digunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan, disusun agar dapat dianalisis berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada BMT Islam Abdurrab Kota Pekanbaru maka hasil Proses akuntansi yang dilakukan di BMT Islam Abdurrab dimulai dengan pencatatan setiap transaksi ke buku kas yang kemudian dibuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan sisa hasil usaha, penyusunan neraca, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan kekayaan dan penyusunan catatan laporan atas laporan keuangan. Pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan dalam BMT Abdurrab ini menggunakan prinsip accrual basis, yaitu dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadinya transaksi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui BMT Islam Abdurrab Kota Pekanbaru dalam menerapkan akuntansi belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum.

Kata kunci: Penerapan Akuntansi, Pendapatan, Beban.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the suitability of accounting treatment at BMT Islam Abdurrah Pekanbaru with generally accepted accounting principles (Sharia PSAK). The types of data used are primary and secondary data. And using interview and documentation data collection techniques. In the research at BMT Islam Abdurrah Pekanbaru, the data analysis used descriptive method, namely the research method by collecting data, grouped, arranged so that it can be analyzed based on relevant theories related to the problems discussed and then drawn a conclusion. Based on the results of the analysis and discussion conducted at BMT Islam Abdurrah Pekanbaru City, the results of the accounting process carried out at BMT Islam Abdurrah begins with recording each transaction to the cash book which is then made a financial report consisting of a report on remaining operating results, balance sheet preparation, preparation of flow reports cash, preparation of reports on changes in wealth and preparation of report notes on financial statements. Recognition of income and expenses applied in BMT Abdurrah uses the accrual basis principle, namely by recognizing revenues and expenses when transactions occur. Based on the results of the study, it is known that BMT Islam Abdurrah Pekanbaru City in applying accounting has not been in accordance with generally accepted accounting principles.

Keywords: Accounting Application

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada BMT Islam Abdurrah Pekanbaru”** yang disusun sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di \sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta Bapak Wakil Rektor I, II, III Universitas Islam Riau.
2. Ibu DR Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penuli dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Kedua Orangtua tercinta yang tidak henti-hentinya selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang, arahan serta perhatian yang tak terhingga, serta kakak yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

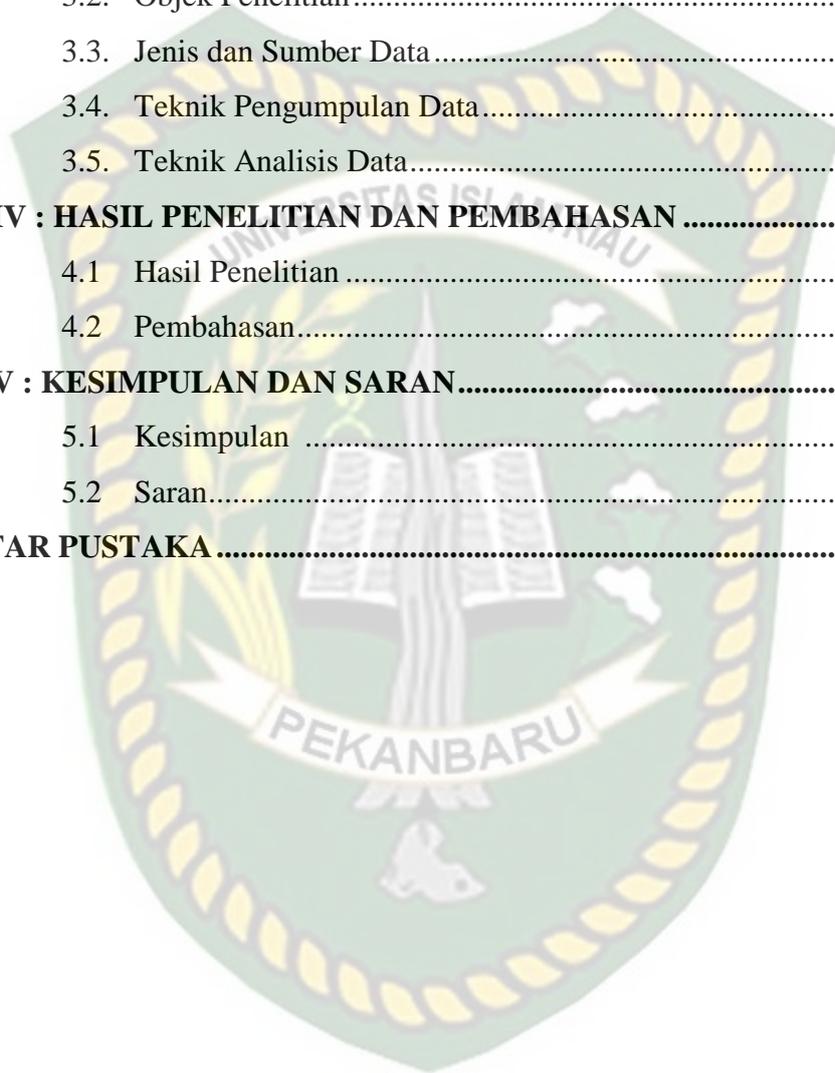
Pekanbaru, 16 Agustus 2022
Penulis,

ASRIANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PERBAIKAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	v
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	vi
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	viii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ix
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1. Telaah Pustaka	11
2.2.1 Pengertian Akuntansi	11
2.2.2 Siklus Akuntansi	15
2.2.3 Akuntansi Transaksi Syariah Murabahah.....	18
2.2.4 Pengertian Badan Usaha Koperasi	19
2.2.5 Laporan Keuangan Koperasi	25
2.2.6 Penyajian Laporan di Neraca	27
2.2.7 Penyajian Perhitungan Hasil Usaha	33
2.2.8 Penyajian Laporan Arus Kas Untuk Koperasi	35
2.2.9 Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota	37

2.2. Hipotesis	31
BAB III : METODE PENELITIAN	38
3.1. Desain Penelitian.....	38
3.2. Objek Penelitian.....	38
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.2 Pembahasan.....	43
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi (Rudianto, 2015). Berkaitan dengan lembaga syariah maka pencatatan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip islam adalah terbebas dari riba. Dengan adanya standar akuntansi syariah, laporan keuangan diharapkan dapat relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Standar akuntansi juga digunakan oleh pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintahan, dan masyarakat umum sebagai acuan untuk memahami dan menganalisis laporan keuangan sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang benar. Dengan demikian, standar akuntansi memiliki peranan penting bagi pihak penyusunan dan pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau informasi yang tepat terdapat dalam laporan keuangan. (Elin erlina 2015).

Bagi lembaga syariah, tujuan dari laporan keuangan adalah (1) sebagai dasar pengambilan investasi dan pembiayaan; (2) sebagai sarana untuk menilai prospek arus kas; (3) memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi; (4) memberikan informasi kepatuhan lembaga syariah terhadap prinsip syariah; (5) laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga syariah terhadap amanah dalam menggunakan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak

dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan (6) memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial (Fajarwati & Sambodo, 2015).

Tujuan laporan keuangan lembaga syariah tersebut sejalan dengan tujuan laporan keuangan secara umum yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2016), yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud meliputi manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Pihak eksternal meliputi kreditor dan pemerintah.

Laporan keuangan yang disusun oleh setiap perusahaan menurut Warren, Reeve, dan Fess (2008:24) meliputi: (1) Laporan Laba Rugi, yang mengikhtisarkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, (2) Laporan Ekuitas Pemilik, yang mengikhtisarkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, (3) Neraca, yang mengikhtisarkan keadaan atau posisi keuangan perusahaan (asset, kewajiban, ekuitas pemilik) pada tanggal tertentu, dan (4) Laporan Arus Kas, yang mengikhtisarkan penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu.

Dalam hal penerapan akuntansi juga perlu memperhatikan konsep dan prinsip dasar dari akuntansi. Adapun konsep dasar dari akuntansi menurut IAI

(2019) yaitu : (1) Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*), yaitu prinsip yang menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya, (2) Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*) yang merupakan cara penentuan pendapatan berkala, yang dapat memenuhi kebutuhan untuk penyusunan laporan keuangan yang tepat pada waktunya, (3) Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*) yaitu periode akuntansi tertentu harus dipertemukan secara layak dengan biaya-biaya yang terjadi dalam periode akuntansi yang sama, (4) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*) agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya harus diterapkan konsistensi, (5) Prinsip pengungkapan penuh (*Full Disclosure Principle*) yang merupakan penyajian informasi yang lengkap dalam laporan keuangan.

Melihat pentingnya laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan diharapkan memiliki kualitas tinggi yang dapat dipahami secara relevan, materialitas, keandalan, substansi mengulik bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat (IAI, 2019). Majalah Akuntansi Indonesia (2009) menuliskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri atas tiga pilar yaitu SAK (Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum), SAK ETAP, dan SAK Syariah.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2009 oleh IAI. Entitas tanpa

akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial eksternal) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Menurut (Chariri, 2012) jenis usaha yang tergolong dalam entitas tanpa akuntabilitas publik banyak terdapat di Indonesia mulai dari usaha kecil dan menengah termasuk juga badan usaha seperti Baitul Mal Wat. Pada penelitian ini difokuskan pada Baitul Mal Wat, karena BMT memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional, seperti pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian, dan menciptakan pasar baru.

BMT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk badan usaha Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrab. Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrab atau disingkat BMTIA berdiri di Kampus Universitas Abdurrab, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau oleh 33 orang pendiri pada Kamis, 10 Maret 2016 yang bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah pukul 14.10 WIB. BMT Islam Abdurrab mulai operasional pada Jumat, 10 Juni 2016 yang bertepatan dengan 5 Ramadhan 1437 Hijriyah. BMT ini melakukan kegiatan antara lain penghimpunan dana antara lain tabungan, deposito, kemudian kegiatan penyaliran dana dan layanan seperti supermaket, pembelian tiket serta saldo pulsa, listrik dan lain-lain.

Proses akuntansi yang terjadi pada BMTIA adalah dimulai dari adanya bukti transaksi seperti nota, kuitansi ataupun faktur yang kemudian dicatat dalam buku kas. Pencatatan saat terjadinya setoran simpanan seperti simpanan wajib, simpanan pokok atau simpanan sukarela dilakukan pada saat terjadinya dengan cara mendebet kas dan mengkreditkan simpanan. Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan dilakukan dengan cara mendebet biaya dan mengkreditkan kas.

Pada pos aset lancar diketahui perkiraan pembiayaan konsumtif Murabahah sebesar Rp. 1.178.439.949,-. BMTIA tidak melakukan pencatatan terhadap penyisihan piutang atas pembiayaan konsumtif Murabahah. BMTIA juga memiliki antar kantor aktiva sebesar Rp. 347.400.000,- yang tidak ada akumulasi penyusutannya melainkan mencatat di pos pasiva (antar kantor pasiva). BMTIA tidak memiliki pembiayaan investasi Mudharabah, namun pada tahun 2019 BMTIA memiliki pembiayaan investasi Mudharabah sebesar Rp. 14.350.000,-.

BMTIA memiliki biaya administrasi dan umum sebesar Rp. 184.409.260,- meningkat sebesar 49,96% dari tahun sebelumnya. BMTIA sudah memisahkan pendapatan yang diperolehnya yakni terdiri dari pendapatan jual beli, pendapatan bagi hasil, pendapatan operasional lain dan pendapatan investasi. BMTIA belum membayarkan zakat namun sudah menyetorkan pajak setiap tahun.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu (Rianto: 2015:391).

Secara sudut pandang etimologis BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas sangat khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebenarnya lembaga swadaya masyarakat didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada saat awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri. (Dewi: 2017:99).

Menurut muhammad (2008:24) Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin BMT tumbuh atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Dasar pencatatan yang digunakan oleh BMT dalam mengakui pendapatannya yang berasal dari murabahah dan mudharabah adalah dengan menggunakan *Accrual Basis*, pendapatan diakui pada saat pendapatan itu dihasilkan tanpa memperhatikan kas masuk. Demikian juga dengan pengakuan beban, beban diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pada penyajian neraca BMT memisahkan piutang usaha menjadi piutang pendidikan bagi hasil, piutang pendidikan ijarah, piutang wakallah dan piutang lain-lain. Selain itu piutang dinilai sebesar jumlah bruto tagihan tanpa dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima, sehingga dalam neraca tidak

ada perkiraan penyisihan piutang tak tertagih.

Pada Neraca juga disajikan nilai aktiva tetap sebesar Rp. 60.767.400,- dimana nilai tersebut tidak dirincikan didalam laporan pencatatan aktiva tetap. Simpanan sebagai kekayaan bersih BMT pada tahun 2020 sebesar Rp. 603.056.707,- namun belum memberikan penjelasan tambahan rinci mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah simpanan tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan belum ada pada BMT.

BMT sudah menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat kebijaksanaan akuntansi dan informasi lainnya yang perlu diungkapkan, tetapi belum memuat tentang kebijakan - kebijakan akuntansi.

Permasalahan yang terdapat dalam pencatatan laporan keuangan BMT ini antara lain dalam penyajian laporan laba rugi BMT ini belum membentuk perhitungan tersendiri antara pendapatan atau transaksi penjualan yang dilakukan oleh anggota dan non anggota BMT, sehingga penjualan kepada anggota dan non anggota dilaporkan sebagai penjualan, sehingga alokasi pendapatan dilakukan dari total pendapatan keseluruhan. Kemudian pencatatan perlengkapan dibebankan satu tahun. Penyesuaian terhadap pendapatan yaitu dengan sistem bagi hasil.

BMT juga belum menyajikan laporan arus kas sehingga tidak dapat memberikan informasi yang relevan mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Laporan promosi anggota juga belum disajikan sehingga tidak dapat diketahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota

selama satu tahun tertentu.

Setelah melihat latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, maka penulis tertarik ingin mengetahui dan menelaah lebih dalam tentang penerapan akuntansi pada penyusunan laporan keuangan BMT Islam Abdurrab Pekanbaru. Untuk itu penulis mencoba mengungkapkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BMT ISLAM ABDURRAB PEKANBARU”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membuat perumusan masalah, yaitu :

“Apakah penerapan akuntansi pada BMT Islam Abdurrab Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK Syariah)”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pada BMT Islam Abdurrab Pekanbaru dengan prinsip-prinsip akuntansi yang belaku umum (PSAK Syariah).

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan tentang penerapan perlakuan akuntansi pada BMT Islam Abdurrab Pekanbaru.
- b. Bagi BMT, dapat memberikan informasi dan bahan masukan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan sehubungan dengan penerapan Standar

Akuntansi BMT.

- c. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti peneliti di masa yang akan datang dengan judul yang sama, untuk dapat diteliti lebih lanjut.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam 5 (lima) bab seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan berikut ini :

- BAB I** : Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulis.
- BAB II** : Bab ini merupakan landasan teori-teori yang terdiri dari pengertian definisi akuntansi, badan usaha BMT, pengakuan aktiva, kewajiban dan ekuitas, penilaian dan penyajian perhitungan hasil usaha, penilaian dan penyajian laporan arus kas, penilaian dan penyajian laporan promosi ekonomi anggota dan penyajian catatan atas laporan keuangan dan hipotesis.
- BAB III** : Dalam bab ini berisi lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- BAB IV** : Dalam bab ini akan membahas tentang sejarah singkat BMT, struktur organisasi dan aktivitas BMT Abdurrah. Kemudian dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan di BMT Abdurrah yakni mengenai penyajian necara, penyajian perhitungan rugi laba,

penyajian arus kas dan penyajian catatan dan laporan keuangan lainnya.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi bermanfaat dan menjadi kebutuhan baik bagi orang-orang yang terlibat dalam suatu badan usaha maupun yang tidak terlibat langsung dalam suatu badan usaha. Kebutuhan itu berupa informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang tepat, untuk itulah kita perlu mengetahui pengertian akuntansi tersebut.

Definisi akuntansi menurut Niswonger (2016:6) adalah:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan”

Menurut Jusup (2012:4-5), bahwa definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang yaitu:

a. Definisi dari sudut pemakai

Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi

b. Definisi dari sudut proses kegiatan

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi

Sedangkan menurut Kusnadi (2014:7) definisi akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat di ukur dengan uang, menjadi laporan keuangan dengan cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip yang diakui umum sehingga para pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil operasinya pada setiap waktu diperlukan dan dari padanya dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan di bidang ekonomi”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi berupa data kuantitatif (angka), yang dimanfaatkan oleh pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

Seni merupakan suatu penerapan yang sangat tergantung kepada kesukaan pelakunya atau pelaksananya Hal ini berarti pada praktek akuntansi pada setiap perusahaan kemungkinan berbeda, karena seni mengolah transaksi setiap perusahaan tersebut tergantung pada kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu sifat dari akuntansi tidak mutlak, tetapi relatif bisa berubah sesuai kebutuhan, waktu dan keadaan.

Mengenai tujuan akuntansi, menurut Kusnadi (2014:7-8) dapat dibagi menjadi:

1. Tujuan Umum
Adalah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar serta menyajikan atau membantu mempersiapkan informasi tentang bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas; seperti modal, tenaga kerja, tanah dan bahan baku guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Sedangkan kedalam (bagi manajemen) adalah bagaimana mereka mengalokasikan sumber-sumber dari berbagai proyek alternatif.
2. Tujuan Khusus
 - a Menghitung laba yang dicapai oleh perusahaan kemudian menilai apakah pimpinan perusahaan telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang telah ditugaskan kepadanya oleh para pemilik.
 - b. Membantu mengamankan dan mengawasi semua pihak dan

- kewajiban perusahaan khususnya dari segi ukuran financial.
- c. Memberikan informasi yang sangat berguna dan relevan kepada para pihak yang berkepentingan seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas maupun ratio-ratio lainnya.

Prinsip akuntansi pada dasarnya meliputi standar atau kebiasaan, konvensi atau tradisi akuntansi yang berlaku dalam prakteknya. Oleh sebab itu dalam penyusunan prinsip akuntansi harus diperhatikan tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan dari prinsip akuntansi adalah dapat menyajikan informasi tentang keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan

Prinsip akuntansi sangat penting bagi perusahaan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan maka perlu diketahui tujuan dari prinsip itu.

Adapun tujuan dari prinsip itu adalah (Harahap, 2015:4) :

- a. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan.
- b. Memberikan pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independent dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan
- c. Memberikan “data base” kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan makro lainnya.
- d. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan prinsip akuntansi. Semakin banyak prinsip yang dikeluarkan semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, polemik dan penelitian.

Jadi dalam penyusunan laporan keuangan, setiap badan-badan usaha termasuk badan usaha BMT harus mempunyai pedoman. karena dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi dihadapkan dengan kemungkinan bahaya penyimpangan (bias), salah penafsiran, ketidaktepatan dan kemenduaan

(*ambiguity*)(Kieso , 2016:11)

Sehingga untuk meminimalisasi hal tersebut harus berpedoman kepada suatu prinsip yang di terima umum, di Indonesia di kenal dengan istilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

2.1.2 Siklus Akuntansi

Menurut Bahri (2016:18) siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Kegiatan pencatatan akuntansi meliputi:

- a. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
- b. Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
- c. Pemindah-bukuan ke dalam buku besar (*posting*).
- d. Pembuatan neraca saldo (*trial balance*).
- e. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (*adjustment*)
- f. Penyusunan laporan keuangan (*financial statement*).
- g. Pembuatan jurnal penutup (*closing entries*)
- h. Pembuatan neraca saldo penutup (*post closing trial balance*)
- i. Pembuatan jurnal balik (*reversing entries*)

Rangkaian urutan tahapan proses dari suatu transaksi dan peristiwa sampai dengan pelaporan pada akhir periode dan berlanjut dari analisa transaksi sampai pelaporan periode berikutnya dan begitu seterusnya. Proses atau siklus akuntansi menurut Kartikahadi dkk (2016:22):

- a. Tahap Pencatatan
- b. Tahap Pengikhtisaran

c. Tahap Pelaporan

Masing-masing tahap dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap pencatatan ini terdiri dari jurnal, buku besar dan neraca saldo. Jurnal adalah daftar atau buku tempat mencatat transaksi secara kronologis (berurutan) sesuai tanggal terjadinya transaksi dengan mencantumkan akun yang didebit dan akun yang dikredit serta jumlah nominal masing-masing.

Buku besar (*Ledger*) adalah kumpulan akun-akun suatu perusahaan. Pencatatan atas bertambah atau berkurangnya suatu akun dalam buku besar akan mempengaruhi satu atau lebih akun lainnya. Hal ini merupakan akibat dari sistem pencatatan berpasangan (*double entry system*). Pengaruh dari kenaikan atau penurunan suatu akun adalah bertambahnya atau berkurangnya akun lain. Dalam pencatatan akun-akun di buku besar membutuhkan akun-akun yang tersusun dengan baik. Untuk membantu penyusunan akun-akun tersebut, dibutuhkan Kode akun. Kode akun yaitu simbol berupa angka, huruf, atau gabungan keduanya yang menunjukkan akun tertentu. Bagan atau daftar yang menunjukkan kode akun dan akun yang dikodekannya disebut bagan akun. Dalam pembuatan kode akun harus diingat bahwa perusahaan (BMT Abdurrab) akan berdiri atau beroperasi selamanya (prinsip *going concern*). Dengan demikian kode yang dibuat harus dirancang untuk kepentingan jangka panjang.

Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini, dan karenanya menunjukkan apakah total debet sama dengan total kredit. Jadi suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan pembukuan. Dalam neraca saldo terdapat hampir semua perkiraan pendapatan

dan beban perusahaan. Dikatakan hampir semua, karena masih ada pendapatan dan beban yang mempunyai pengaruh lebih dari satu periode akuntansi. Itulah sebabnya neraca ini disebut dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian.

Tahap Pengikhtisaran terdiri dari jurnal penyesuaian, jurnal pembalik dan neraca lajur. Jurnal penyesuaian (*adjusting entries*) adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode dimana beban itu terjadi. Jurnal penyesuaian akan membuat pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan memperbaharui perkiraan Aktiva dan Kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Dengan kata lain, melalui jurnal penyesuaian dapat ditimbulkan perkiraan yang tidak kelihatan. Perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian diantaranya adalah biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu dan lain sebagainya.

Jurnal pembalik (*reversing entries*) adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal pembalik ini dilakukan dengan tujuan agar pencatatan dalam periode berikutnya dapat dilakukan dengan mudah, serta mencegah terjadinya kekeliruan menjurnal pada saat jatuh temponya. Terdapat empat macam jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal pembalik yaitu biaya yang masih harus dibayar, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan diterima dimuka.

Neraca lajur adalah kertas yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan, memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Fungsi dari neraca lajur ini adalah untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan, meringkas data, baik data neraca saldo maupun data penyesuaian, memudahkan dalam menentukan kesalahan yang mungkin terjadi ketika melakukan penyesuaian.

Tahap Pelaporan terdiri dari laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Akuntansi Transaksi Syariah Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8) (Salman, 2012).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5) (IAI, 2019). Definisi ini menunjukkan bahwa murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2013:138).

2.1.4 Pengertian Badan Usaha BMT

Kata BMT ini berasal dari bahasa inggris, yaitu *Coperation* yang dapat diartikan sebagai usaha bersama Di Indonesia BMT diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1967 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No.25 tahun 1992. dalam Undang-undang tersebut BMT didefinisikan sebagai berikut: “BMT adalah organisasai ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum BMT yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”

Sunindhia (2012:1-3) memberikan definisi BMT sebagai berikut:

“BMT adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”

BMT bekerjasama secara kekeluargaan, hal ini berarti dalam menjalankan usahanya melibatkan seluruh anggota secara gotong royong, sebagaimana lazimnya suatu keluarga, sehingga apapun yang terjadi menjadi tanggungan bersama Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.

Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa karakteristik utama BMT yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota BMT memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa BMT (*user own oriented firm*). Oleh karena itu :

1. BMT dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama
2. BMT didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota BMT percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
3. BMT didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
4. Tugas pokok badan usaha BMT adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members' welfare*).
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan BMT kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota BMT.

BMT sebagai organisasi ekonomi tentunya mempunyai kelengkapan atau perangkat BMT yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan operasionalnya. Ign Sukamdyo mengutip dari (Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992) alat kelengkapan atau perangkat organisasi BMT terdiri dari : rapat

anggota, pengurus dan pengawas

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT, Rapat Anggota berarti bertemunya para anggota BMT pada waktu-waktu tertentu pada suatu rapat. Waktu-waktu tertentu untuk mengadakan rapat ini telah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Dalam rapat anggota ada beberapa hal yang ditetapkan yaitu :

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran dan belanja BMT serta pengesahan laporan keuangan
- e. Pembagian Sisa Hasil Usaha
- f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran BMT

2. Pengurus BMT

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BMT dalam rapat anggota. Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan BMT dan usahanya kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Oleh karena itu pengurus harus menyusun laporan tahunan setelah tahun buku BMT ditutup. Hal-hal yang termuat dalam laporan tahunan tersebut :

1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
2. Keadaan dan usaha BMT serta hasil usaha yang dapat tercapai.
3. Pengawas BMT

Tugas dan wewenang pengawas ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-

Undang No. 25 Tahun 1992 sebagai berikut :

- a. Pengawas bertugas:
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan BMT
 - 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
- b. Pengawas berwenang:
 - 1) Meneliti catatan yang ada pada BMT
 - 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

BMT sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 harus di beri kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang. Karena BMT dapat mengatasi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, yaitu antara masyarakat yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat dengan masyarakat yang berkedudukan ekonomi lemah. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, jenis-jenis usaha BMT hendaknya meliputi berbagai bidang kegiatan ekonomi masyarakat.

Jenis-jenis usaha BMT itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dari segi luas usaha, BMT di bagi menjadi :
 - (i) *Multiple Purpose Cooperative* atau BMT serba usaha, adalah BMT yang memiliki bermacam-macam bidang atau lapangan kegiatan usaha Misalnya BMT Unit Desa yang memiliki usaha Waserda (waning serba ada), usaha simpan pinjam dan pengadaan alat-alat pertanian
 - (ii) *Single Purpose Cooperative* adalah BMT yang hanya memiliki satu macam usaha saja misalnya BMT pengangkutan, BMT konsumsi
- b. Dari segi unguatarnya
 - (i) BMT primer yaitu BMT yang anggotanya terdiri dari individu-individu misalnya BMT Karyawan (kopkar), BMT Pegawai REPUBLIK Indonesia (KPRI)
 - (ii) BMT sekunder yaitu BMT yang beranggotakan beberapa buah BMT atau badan hukum koperasi, misalnya BMT Unit Desa, Gabungan BMT dan Induk BMT
- c. Dari segi fungsinya, terdiri atas:
 - (i) BMT konsumsi yaitu BMT yang berusaha melayani para anggotanya dengan menjual barang-barang konsumsi dengan harga murah dan mudah mendapatkannya. Misalnya BMT yang usaha utamanya

mengelola waning serba ada.

- (ii) BMT produksi yaitu BMT yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri, tetapi bekerjasama dalam wadah BMT untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa Kegiatan utamanya adalah menyediakan, mengoperasikan atau mengelola sarana produksi bersama
- (iii) BMT kredit / simpan pinjam adalah BMT yang menampung dan memberi pinjaman kepada anggotanya dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku di wilayah tersebut. Jenis usaha simpan pinjam ini diatur dalam pasal 44 Undang-Undang No.25 Tahun 1992.
- (iv) BMT jasa, BMT yang bergerak dalam bidang jasa Kegiatan utamanya adalah menghasilkan dan menyediakan jasa contohnya BMT asuransi.
- (v) BMT pemasaran adalah BMT yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

2.1.5 Laporan Keuangan BMT

Menurut Kusnadi (2014:92-94) laporan keuangan bagi BMT merupakan sarana untuk menilai kinerja pengurus atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki BMT selama periode tertentu. Definisi laporan keuangan untuk badan usaha BMT menurut Hiro Tugiman adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan BMT adalah laporan keuangan yang di susun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan secara keseluruhan (Corporate) sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan BMT yang terutama ditujukan kepada anggota dan tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha”

Agar laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi pemakainya, maka laporan keuangan yang disajikan harus memiliki karakteristik – karakteristik tertentu yaitu:

- a. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar, namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Agar dapat bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Materialitas

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karenanya materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan

e. Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

f. Substansi menguguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya

g. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu,

h. Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu seperti ketertagihan piutang yang diragukan perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam ini

diakui mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat (Prudence), dalam penyusunan laporan keuangan.

i. Kelengkapan

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu seperti ketertagihan piutang yang diragukan perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam ini diakui mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan laporan keuangan.

j. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat raemperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecendrungan (trend) posisi dan kinerja keuangan.

Untuk mencatat transaksi terdapat dua dasar pencatatan transaksi yang dapat di gunakan, hal ini untuk mengetahui kapan suatu transaksi atau peristiwa harus dibukukan sebagai aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban yaitu (Belkaoui, 2016:180) :

1. Akuntansi akrual yaitu mengakui pendapatan pada saat hal itu dihasilkan dan mengakui beban pada saat periode hal itu terjadi, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas
2. Akuntansi kas yaitu pendapatan dicatat hanya bila kas diterima dan beban dicatat hanya bila kas dibayarkan. Penentuan laba atas dasar kas mengandalkan pada penerimaan pendapatan dan pembayaran beban, dan prinsip pencocokkan diabaikaa Akibatnya laporan atas dasar kas tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.

Banyak badan usaha, khususnya BMT yang masih kecil menerapkan dasar pencatatan kas, karena masih sederhananya sifat dan jenis kegiatan BMT serta terbatasnya pengetahuan pengurus mengenai akuntansi dan cara penyajiannya dilaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada hal dengan diterapkannya dasar pencatatan akrual maka manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi mengenai transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas, tetapi juga pembayaran dan penerimaan dimasa mendatang.

2. Pengendalian melalui anggaran akan lebih efektif dibandingkan dengan penerapan basis akuntansi kas, karena akuntansi kas tidak relevan untuk menghubungkan antara pendapatan dan beban dalam suatu periode.

2.1.6 Penyajian Laporan di Neraca

Neraca BMT merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan BMT pada saat tertentu. Definisi neraca menurut Talman dan Rival (2016:1) adalah :

“Neraca adalah suatu daftar baik yang disusun pada waktu berdirinya perusahaan/BMT (neraca pembukuan), atau disusun selama tahun pembukuan/periode pembukuan masih berjalan (neraca bulanan atau neraca antara) maupun yang disusun pada akhir tahun buku (neraca tahunan), neraca likuidasi, dalam bentuk angka-angka dan bentuk perkiraan Scontro atau T Account ataupun Staffel atau Report form, dalam hal mana Harta atau Aktiva, Utang atau Passiva dan Modal pada satu saat tertentu/periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk uang/ nilai uang”

Aktiva (Assets)

Definisi aktiva menurut Sofyan (2014:107) sebagai berikut :

“Harta yang dimiliki perusahaan yang diperlukan dalam operasi perusahaan seperti : kas, tagihan-tagihan atau piutang-piutang, barang-barang dagangan/persediaan/ inventory, tanah, gedung, mesin-mesin kendaraan dan lain-lain”

Sehubungan dengan badan usaha BMT, ada beberapa ketentuan penggunaan aktiva BMT yaitu:

1. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian BMT diakui sebagai aktiva lain-lain, sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Aktiva-Aktiva yang dikelola oleh BMT, tetapi bukan milik BMT, tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktiva Lancar (Current Assets)

Aktiva lancar dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mudah dicairkan menjadi uang kas dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Menurut Kusnadi definisi aktiva lancar adalah : “Harta berupa uang atau berupa barang-barang lain yang dalam waktu pendek diharapkan menjadi kas yang akan yang digunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan operasi perusahaan dalam satu siklus periode akuntansi yang umumnya paling lama satu tahun”. Rival (2016:4) mengklasifikasikan aktiva lancar dalam beberapa bagian:

a. Kas dan bank

Kas dan bank adalah uang kas atau surat berharga sejenis kas baik yang ada di dalam BMT maupun yang ada di bank, yang dapat digunakan atau dicairkan seketika dan diterima sesuai dengan nilainya oleh umum.

Kelompok akun kas dan bank pada BMT terdiri dari tiga bagian :

1. Rekening-rekening yang penggunaannya dibatasi untuk khusus. Pembatasan ini, pada umumnya berdasarkan ketentuan pada pemerintah sehubungan dengan program pengadaan dan penyaluran yang memperoleh fasilitas dari pemerintah.
2. Rekening bank yang dibuka oleh BMT tapi dananya ditetapkan untuk BMT lain. Untuk keperluan standar akuntansi, rekening tersebut diklasifikasikan sebagai rekening atas nama BMT (titipan).
3. Rekening-rekening atas nama milik BMT tetapi wewenang penggunaannya dibatasi oleh ketentuan pemerintah.

Penentuan nilai kas dan bank tidak menimbulkan masalah sebab kas dan bank telah menunjukkan nilai yang melekat pada kas dan bank sesuai dengan fungsinya sebagai alat pengukur nilai. Kas dan bank milik BMT yang wewenang penggunaannya dibatasi disajikan terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau aktiva jangka panjang tergantung waktu pembatasannya. Sedangkan

kas dan bank bukan milik BMT merupakan aktiva titipan.

b. Piutang

Piutang adalah menunjukkan tagihan yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan. Piutang yang timbul bukan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan digolongkan kedalam piutang lain-lain.

Penyajian piutang dari anggota dan piutang dari non anggota harus dipisahkan, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan anggota dengan BMT.

Dalam menentukan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih dapat digunakan salah satu dari perhitungan ini, yaitu (Baridwan, 2013:50):

1. Jumlah penjualan

Apabila kerugian piutang dihubungkan dengan proses pengukuran sisa hasil usaha maka dasar perhitungan kerugian piutang adalah jumlah penjualan.

2. Saldo piutang

Apabila saldo piutang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian piutang maka arahnya adalah menilai aktiva tetap dengan teliti.

Dalam menilai piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan di kurangi dengan taksiran piutang tak tertagih Berarti pelaporan piutang dalam neraca adalah sebesar jumlah yang direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

c. Persediaan

Persediaan adalah segala benda atau barang yang dimiliki oleh perusahaan yang akan digunakan atau dijual dikemudian hari. Sedangkan Persediaan barang dagang BMT yaitu barang-barang yang dimiliki oleh BMT atau belum dijual pada saat tertentu, dengan maksud untuk dijual kembali dalam siklus operasional normal perusahaan (dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun).

Sesuai dengan konsep harga pokok/perolehan, seluruh kewajiban BMT sehubungan dengan transaksi perolehan komoditi program, termasuk iuran-iuran yang bersangkutan oleh pemerintah dan gerakan BMT, dapat dipandang sebagai pengorbanan ekonomis, dan karena itu seluruh kewajiban tersebut merupakan unsur harga pokok. Dana-dana yang akan diperoleh kembali dapat dipandang sebagai pendapatan lain-lain pada saat penerimaan tersebut direalisasi.

Investasi Jangka Panjang

Investasi atau penyertaan jangka panjang yaitu penanaman modal pada badan usaha lain diluar BMT. Investasi (penyertaan) diklasifikasi menurut jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Berikut ini ketentuan mengenai investasi atau modal penyertaan yang dimuat dalam Standar Akuntansi Perkoperasian sebagai berikut:

1. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.
2. Modal penyertaan ikut menutupi resiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas permodalan didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu modal penyertaan diakui sebagai ekuitas.
3. Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam hal modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai

taksiran. Penjelasan yang cukup harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atas penilaian yang dilakukan.

4. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Investasi pada BMT wewenang pencairannya merupakan investasi yang jatuh temponya belum pasti, karenanya dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang.

Penyajian investasi diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan sebagai berikut:

- a. Investasi dalam kelompok investasi jangka panjang dan pendek pencairannya tidak dibatasi, disajikan sebagai aktiva lancar, walaupun investasi tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Pendapatan sehubungan dengan investasi ini diakui pada saat realisasi dan disajikan sebagai pendapatan lain-lain.
- b. Investasi yang bersifat permanen pada BMT lain dan tidak dapat diperjualbelikan disesuaikan secara terpisah sebagai investasi jangka panjang
- c. Investasi tersebut diatas pada saat kewajiban untuk menyetor telah terjadi. Investasi ini dicatat dengan menggunakan metode harga pokok.

Berdasarkan uraian diatas maka penyajian investasi dineraca dinilai sebesar harga perolehan (cost) dari investasi atau modal penyertaan tersebut.

Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud fisik yang sifatnya relatif permanen, digunakan dalam kegiatan operasi BMT, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva:

- a. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;
- c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Aktiva tetap dinilai sebesar harga perolehan aktiva tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aktiva tetap adalah suatu alokasi harga perolehan aktiva tetap keperiode-periode akuntansi. Alokasi aktiva tetap dapat digunakan metode yang cocok dengan kondisi aktiv tetap yang dimiliki. Apabila perolehan suatu aktiva tetap melalui pembelian, maka nilai perolehannya adalah harga beli ditambah biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut siap dipakai. Bila perolehan aktiva tetap secara gabungan, maka nilai perolehan tiap-tiap aktiva ditentukan berdasarkan perbandingan nilai wajar dari masing-masing aktiva. Sedangkan aktiva tetap yang diperoleh dari hibah, nilai perolehannya adalah harga taksiran atau harga pasar yang layak pada saat diterima dan mengkreditkan akun modal donasi.

Disamping itu pemerintah kadangkala memberikan bantuan lunak aktiva tetap pada BMT yang pembayarannya dilakukan melalui penyesihan dana-dana tertentu. Aktiva ini diakui sebagai milik BMT dengan mengkredit kewajiban.

Dana yang disisihkan untuk dibayarkan kepada pemerintah tersebut diperlakukan sebagai pengurangan hutang. Akan tetapi bagi BMT yang tidak menerima aktiva tetap maka penyesihan dan pembayaran dana tersebut diperlakukan sebagai beban.

Aktiva Lain-lain

Aktiva lain-lain didefinisikan sebagai berikut :

“Aktiva yang tidak dapat secara layak digolongkan kedalam aktiva lancar, investasi atau peyertaan aktiva tetap ataupun aktiva tidak berwujud”.

Kewajiban

Kewajiban pada badan usaha BMT merupakan kewajiban kepada pihak luar bukan pemilik yang timbul akibat transaksi perolehan sumber daya ekonomi yang dilakukan sehingga mengakibatkan arus kas keluar dimasa yang akan datang.

Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan secara terpisah sebagai hutang kepada anggota, sebaliknya kewajiban yang timbul sehubungan dengan transaksi dengan non anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perlakuan ini dianggap tepat oleh karena informasi semacam ini dapat merupakan petunjuk penting tentang manfaat yang dapat diberikan oleh BMT kepada anggotanya. Kewajiban yang dimiliki badan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya sebagai berikut:

1. Kewajiban lancar, adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain terkecuali pemilik perusahaan yang harus dipenuhi atau dilunasi dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun).
2. Kewajiban jangka panjang, adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain kecuali pemilik perusahaan yang harus dipenuhi atau dilunasi dalam jangka panjang.

Untuk penyajian kewajiban ini pada neraca diatur dalam Standar Akuntansi BMT dengan ketentuan .

“Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya”

Ekuitas

Ekuitas merupakan hak residual atau aktiva setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas BMT terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan

pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi.

Beberapa karakteristik dan penyajian modal BMT yang diatur oleh standar akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Modal Anggota
 - a. Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas BMT dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
 - b. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.
 - c. Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota
2. Modal Penyertaan
 - a. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.
 - b. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu, dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Modal Sumbangan
Modal sumbangan yang diterima oleh BMT yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Cadangan
 - a. Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - b. Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan BMT diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.
5. Sisa Hasil Usaha (belum dibagi)
Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BMT. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian Sisa hasil usaha telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak BMT diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah

pembagiannya belum diatur secara jelas maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.7 Penyajian Perhitungan Hasil Usaha

Sisa hasil usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi netto dan laba atau rugi dengan anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan usaha BMT.

Pengelompokan jasa kepada anggota sebagai beban atau pembagian sisa hasil usaha dapat diperjelaskan dengan uraian sebagai berikut:

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.27 tentang perkoperasian, pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan BMT yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto
2. Pendapatan BMT yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota
3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Ketentuan mengenai perlakuan akuntansi terhadap perhitungan hasil usaha ini diatur sebagai berikut:

- a. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BMT.
- b. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak BMT diakui sebagai kewajiban.
- c. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan
- d. Perhitungan sisa hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota

Sisa hasil usaha yang dibagikan diantaranya digunakan untuk anggota,

dana pendidikan, dan untuk BMT sendiri. Jumlah yang merupakan hak BMT diakui sebagai cadangan. Pembagian sisa hasil usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode pembukuan, jumlah yang dialokasikan selain untuk BMT diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.8 Penyajian Laporan Arus Kas Untuk BMT

Laporan arus kas menyediakan informasi laporan tentang arus kas suatu badan usaha, sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha tersebut.

“Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu”

Arus kas diklasifikasikan berdasarkan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya, perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar.

Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode sebagai berikut :

1. Metode langsung, yaitu kelompok pertama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
2. Metode tidak langsung, yaitu dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dikelompokkan kedalam arus kas kegiatan operasi. Laporan laba rugi yang berasal dari bukan kegiatan operasional seperti penjualan peralatan atau aktiva tetap lainnya tidak termasuk sebagai kelompok kegiatan operasional. Kas yang diterima dari kegiatan ini dimasukkan sebagai kelompok kegiatan investasi atau pembiayaan, mana yang lebih dominan.

Sedangkan dalam pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan.

2.1.9 Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota BMT selama satu tahun tertentu yang dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.

Laporan ekonomi promosi ekonomi anggota tersebut mencakup empat unsur yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang dan pengadaan jasa bersama.
Manfaat ekonomi dari pengadaan barang untuk anggota diperoleh dari

selisih antara pengadaan barang pada harga pasar dengan pengadaan barang pada harga koperasi. Manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh anggota apabila BMT menjual barang pada harga yang lebih rendah dari harga pasar.

- b. Manfaat ekonomi pemasaran dan pengolahan bersama
Manfaat ekonomi dari pemasaran produk anggota dapat ditemui pada BMT yang melakukan pemasaran untuk produk-produk yang dihasilkan anggota. Manfaat ini juga didasarkan dari selisih pemasaran produk anggota atas harga BMT dan harga pasar. Anggota dikatakan menikmati manfaat ekonomi apabila harga pemasaran produk yang ditetapkan BMT lebih dari harga pasar.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pin jam lewat koperasi
Pada BMT yang memiliki unit usaha simpan pinjam, manfaat ekonomi terdiri atas dua jenis yaitu penghematan beban pinjaman anggota merupakan keuntungan yang diperoleh anggota dengan meminjam pada BMT karena adanya selisih bunga pinjaman antara BMT dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Kelebihan balas jasa simpanan anggota merupakan keuntungan yang diperoleh anggota dari menyimpan pada BMT karena adanya selisih bunga simpanan antara BMT dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha
Manfaat ekonomi merupakan manfaat yang diperoleh anggota pada akhir tahun buku dari tahun sisa hasil usaha berjalan. Jika pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dan pembagian sisa hasil usaha dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha akan diterima oleh anggota.

2.1.10 Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian terpadu (*integral*) dari penyajian laporan keuangan. Catatan digunakan untuk memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan hasil usaha. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosure*) yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi mengenai:
 - a. Pengakuan pendapatan dan beban suhubungan dengan transaksi BMT dengan anggota dan non anggota;
 - b. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya;
 - c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.

2. Pengungkapan informasi lain, antara lain mengenai:
 - a. Kegiatan atau pelayanan utama BMT kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi;
 - b. Aktivitas BMT dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota;
 - c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota;
 - d. Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi BMT dengan anggota dan non anggota;
 - e. Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan;
 - f. Aktiva yang dioperasikan oleh BMT tetapi bukan milik koperasi;
 - g. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta;
 - h. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan;
 - i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan;
 - j. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan yang berkaitan dengan laporan keuangan juga mengenai kebijakan BMT atas metode-metode yang digunakan, perolehan aktiva, pembagian sisa hasil usaha, dan sebagainya. Sehingga pengambilan keputusan dapat memahami isi dari laporan keuangan sebuah koperasi.

2.2. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan penulis diatas, maka penulis mengambil hipotesis adalah sebagai berikut BMT Islam Abdurrab Pekanbaru belum menerapkan Akuntansi Perkoperasian sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum (PSAK Syariah).



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penganalisaan terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang telah penulis dapatkan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang dihadapi.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BMT Islam Abdurrah yang terletak di Jalan Riau Ujung No. 73 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data Yang dipakai penulis sebagai pedoman:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pengurus BMT mengenai kegiatan usaha, sejarah koperasi, aktivitas usaha, dan perlakuan akuntansi yang dilakukan koperasi.
- b. Data Sekunder, yaitu adalah data yang penulis peroleh dari kegiatan perusahaan atau BMT yang meliputi laporan keuangan koperasi seperti Neraca, Laporan Laba - Rugi, Perbitungan Hasil Usaha dan laporan - laporan lainnya yang diperoleh dari pengurus koperasi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan pengurus BMT mengenai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang meliputi aktivitas BMT, kebijaksanaan operasional serta kebijaksanaan dibidang akuntansi.
- b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta laporan keuangan BMT.

3.5. Analisis Data

Untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian di BMT ini maka penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan, disusun agar dapat dianalisis berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.2.1 Profil BMT Islam Abdurrah

BMT Islam Abdurrah Pekanbaru merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan sebutan BMT Syariah yang beroperasi berdasarkan Syariah Islam, dimana sistem bunga di koperassi konvensional diganti dengan sistem bagi hasil. Pendirian BMT Islam Abdurrah Pekanbaru diawali dengan suatu gagasan untuk memberikan atau menyediakan suatu lembaga keuangan berbentuk BMT syariah yang sesuai dengan umat Islam yang merupakan penduduk yang mayoritas di Kota Pekanbaru.

BMT Islam Abdurrah cabang Pekanbaru mulai beroperasi pada tanggal 15 juni tahun 2000 merupakan badan pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) . BMT Islam Abdurrah BH/DSKOP&UKM/3/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Rek PINBUK Riau nomor 034/PINBUK/Riau/XI/2000 tanggal 19 Desember 2000 Alamat kantor Pusat BMT Islam Abdurrah jalan Komplek Damar Nomor 610 Camp PT. CPI Rumbai Pekanbaru.

BMT Syariah BMT Islam Abdurrah memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya sebagai BMT syariah. Adapun visi BMT Abdurrah adalah menjadikan pusat kegiatan Islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang makmur lahir dan batin serta sejahtera dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan Visinya, BMT Syariah BMT Islam Abdurrah memiliki Misi,

yaitu memacu pembinaan umat dalam bidang pengembangan usaha muamalah Islam. Nilai-nilai BMT Islam Abdurrah adalah sebagai berikut:

- a. Berkembang sesuai dengan Syariah
- b. Berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Al Quran dan Sunnah
- c. Taat pada syariat Islam, Undang-Undang dan Hukum yang berlaku
- d. menghargai nasabah sebagai bagian integral kemajuan BMT
- e. Mengutamakan Ukhuwah Islamiah
- f. saling tolong menolong dan berlomba dalam kebajikan

4.2.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan merupakan arus kas masuk bruto dan manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode akuntansi. Bila arus masuk ini mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Untuk usaha yang terbentuk BMT pendapatan berasal dari anggota. Pendapatan BMT yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi *bruto*.

Pendapatan yang diperoleh BMT terdiri atas pendapatan jasa simpan pinjam. Pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan dalam BMT simpan pinjam ini adalah dengan menggunakan *accrual basis*. Dengan demikian pendapatan dan beban diakui pada saat transaksi terjadi. Dengan demikian pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi.

4.2.3 Proses Akuntansi di Koperasi

BMT Islam Abdurrahman Pekanbaru adalah BMT yang beranggota masyarakat umum. Dalam melaksanakan aktivitas simpan pinjam BMT melayani anggota.

Proses akuntansi di BMT Islam Abdurrahman Pekanbaru dimulai dengan mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan dalam transaksi seperti kwitansi, nota, faktur, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas dan lain sebagainya. Kemudian dari bukti yang diterima oleh bagian keuangan dicatat ke dalam buku kas yang berisi kas masuk dan kas keluar. Selanjutnya dari pencatatan buku kas ini dibuat buku besar yang akan diteruskan untuk menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan menurut SAK ETAP disebutkan dalam paragraf 3.12 yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. SAK ETAP mensyaratkan dalam paragraf 3.9 bahwa informasi di dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Pada saat menyusun laporan keuangan, SAK ETAP dalam paragraf 2.33 mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yang diatur dalam paragraf 2.34 - 2.38 sebagai berikut.

1. Aset

Pengakuan aset diperbolehkan hanya jika aset tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan mengalir dari dan ke entitas tersebut, dan aset tersebut dapat diukur secara andal. Adanya aset yang tidak diakui disebabkan pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi diduga tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Kondisi ini akan menyebabkan timbulnya pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2. Kewajiban

Pengakuan kewajiban dilakukan jika terdapat pengeluaran yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan dapat diukur secara andal.

3. Penghasilan

Pengakuan penghasilan didapat jika terdapat peningkatan aset ataupun penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Pengakuan beban dapat dilakukan jika terdapat penurunan nilai aset dan peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

5. Laba atau Rugi

Laba atau rugi merupakan selisih antara penghasilan dan beban yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

BMT Islam Abdurrah Pekanbaru hanya memiliki satu transaksi yaitu transaksi anggota. Transaksi dengan anggota hanya meliputi transaksi simpan pinjam, sehingga pencatatan yang dilakukan BMT hanya untuk transaksi simpan pinjam anggota saja, selain itu BMT hanya melakukan pencatatan untuk pendapatan *bruto*.

4.2.4 Penyajian Laporan Keuangan

Neraca

Pada neraca, aktiva lancar terdiri atas kas dan bank, piutang anggota, piutang lain-lain dan persediaan, penyertaan, sedangkan pada posisi aktiva tetap terdiri atas tanah bangunan dan inventaris. Pada posisi pasiva terdiri atas kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Pada BMT ini neraca disajikan setiap satu tahun sekali. Meskipun demikian, setiap bulan BMT biasanya membuat neraca bayangan pada bulan yang bersangkutan. Pembuatan neraca ini dilakukan pengurus untuk mengetahui tingkat perkembangan BMT secara periodik. Selain itu, neraca ini juga akan berguna jika pengurus ingin mengajukan pinjaman dana pada pihak ketiga.

a. Kas

Penilaian kas yang dicantumkan di neraca merupakan jumlah kas yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan tidak terikat penggunaannya. Sesuai dengan sifat kas yang paling likuid, maka kas disajikan pada urutan yang paling atas dari aktiva lancar. Penilaian kas yang dicantumkan di neraca merupakan jumlah kas yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan penggunaannya tidak terikat.

Kas yang dimiliki dalam BMT ini tidak dilakukan pemisahan antara kas besar dengan kas kecil. Kas yang dimiliki hanya satu. Jika jumlah kas dinilai besar maka akan dilakukan penyimpanan ke bank. Jika jumlah kas dinilai kecil, maka jumlah tersebut akan ditambah dari pengambilan tabungan BMT di bank. Jumlah kas pada periode 2020 sebesar Rp. 104.139.550,00 yang merupakan kas tunai yang ada pada kas BMT. Kas tunai yang ada pada kas ini berfungsi untuk membiayai kebutuhan BMT dan pinjaman anggota. Jika ada anggota yang melakukan pinjaman dalam jumlah yang besar, maka kas akan ditambah melalui perkiraan bank. Demikian juga bila jumlah kas besar akibat dari ada anggota yang membayar piutang, maka kas akan dikurangi dengan penyimpanan di bank. Sedangkan dana bank tahun 2020 sebesar Rp. 180.097.868,- yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk membiayai kegiatan operasional.

Biasanya BMT hanya memiliki kas tunai sebesar Rp. 500.000,- per hari, sedangkan jika terdapat penerimaan yang menyebabkan kas berjumlah lebih dari Rp. 500.000,- maka BMT akan menyetorkan dana kas tersebut ke bank dan hanya menyalakan sebesar Rp. 500.000,- di kas.

Piutang

1) Piutang Anggota

Pada bagian harta lancar di neraca terdapat perkiraan piutang yang disajikan dengan merinci ke dalam kelompok piutang yang terdiri dari piutang anggota. Dalam perkiraan piutang anggota terdapat perkiraan piutang sebesar Rp. 552.951.418,00 yang terdiri dari piutang simpan pinjam anggota. Dalam penyajian piutang ini BMT tidak mengelompokkan piutang berdasarkan jangka

waktu pembayarannya, baik piutang jangka panjang ataupun piutang jangka pendek. Selain itu BMT tidak menaksir akan terjadinya kerugian dalam piutang tersebut. Padahal, piutang yang diberikan mengandung resiko apabila anggota pindah keluar daerah ataupun meninggal dunia.

Piutang yang disajikan di neraca terdiri dari piutang anggota simpan pinjam, piutang pembangunan, tunggakan angsuran, dan piutang lainnya. Piutang tunggakan angsuran ini maksudnya adalah tunggakan anggota yang tidak mau membayar simpanan pokoknya setiap bulan, tidak membayar angsuran pinjamannya atau dengan kata lain anggota yang tidak mematuhi komitmen dan aturan yang telah ditetapkan.

Akibat adanya masalah-masalah pembayaran dan angsuran terhadap piutang tersebut maka seharusnya BMT melakukan penyisihan atas piutang tidak tertagih ini berdasarkan atas umur piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sesuai jumlah piutang pada BMT misalnya 0,5% dari jumlah piutang. Hal ini dilakukan dengan asumsi jika suatu saat piutang tersebut dapat dilunasi oleh anggota, sehingga piutang tidak tertagih tidak menambah kerugian bagi pihak BMT. Pencatatan yang seharusnya dilakukan saat melakukan penyisihan piutang tidak tertagih diasumsikan sebagai berikut.

Beban Piutang Tidak Tertagih untuk tahun 2020 adalah

$$= 0,5\% \times 552.951.418,00$$

$$= \text{Rp. } 2.764.757,00$$

Sehingga jurnal piutang tidak tertagih dengan asumsi 0,5% dari total piutang dicatat sebagai berikut.

Beban Piutang Tak Tertagih Rp. 2.764.757,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 2.764.757,00

Dan jurnal yang harus dibuat perusahaan saat melakukan penghapusan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp. 2.764.757,00

Piutang Tidak Tertagih Rp. 2.764.757,00

2) **Penyisihan Penghapusan Piutang**

Pada bagian harta lancar BMT Islam Abdurrah Kota Pekanbaru juga memiliki perkiraan penyisihan penghapusan piutang pembangunan Kantor PKP-RI tahun 2020 yang berjumlah Rp. 4.808.600,- yang jumlahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Piutang ini merupakan piutang penyisihan penghapusan piutang BMT untuk BMT Islam Abdurrah Kota Pekanbaru khusus untuk Kota Pekanbaru. Penyisihan penghapusan piutang dimaksudkan jika ada piutang anggota BMT yang sudah tidak bisa ditagih lagi disebabkan karena peminjam yang sudah meninggal atau pindah ke daerah lain dan tidak bisa dihubungi.

3) **Tunggakan Angsuran**

Tunggakan angsuran merupakan salah satu perkiraan yang terdapat di harta lancar BMT Islam Abdurrah Kota Pekanbaru. Tunggakan angsuran ini merupakan tunggakan angsuran anggota yang sudah lewat dari waktu yang ditetapkan yang biasanya terdiri dari tunggakan angsuran simpanan pokok, simpanan wajib, sehingga untuk memudahkan pengurus mengetahui jumlah tunggakan angsuran anggota maka dibuatlah perkiraan tunggakan angsuran. Tunggakan angsuran ini

umumnya banyak bagi anggota yang berdomisili di luar daerah seperti anggota yang berdomisili di daerah kabupaten.

4) Penempatan Pada Lembaga Lain-lain

Penempatan pada lembaga lain-lain merupakan penempatan/tagihan atau simpanan milik Bank pada Bank Lain untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan berjumlah Rp. 33.276.435,- tahun 2020. Penempatan pada lembaga lain-lain biasanya dalam bentuk giro, tabungan, deposit on call, sertifikat deposito dan lain sebagainya.

b. Pembiayaan Konsumtif

BMT Islam Abdurrab Rumbai Kota Pekanbaru juga mencatat perkiraan pembiayaan konsumtif sebesar Rp. 1.178.439.949,00. Pembiayaan konsumtif ini merupakan murabahah, ijarah, salam, istishna. Nilai pembiayaan konsumtif ini mengalami penurunan dari jumlah tahun sebelumnya sebesar 1,20%. Pembiayaan konsumtif ini terjadi akibat adanya tambahan modal yang diperoleh dari kerabat pejabat BMT yang berada di daerah lain dan tidak terdaftar sebagai anggota BMT, sehingga dengan demikian BMT mengkategorikannya sebagai penyertaan.

c. Aktiva Tetap

Tahun 2019 di neraca nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp. 38.916.381,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 40.312.924,00. Dengan demikian, terdapat biaya penyusutan tahun 2020 sebesar Rp. 1.396.543,00. Biaya penyusutan yang dilakukan BMT tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, namun

pencatatan yang dilakukan untuk penyusutan masing-masing aktiva tetap tidak jelas informasinya, hal ini disebabkan tahun perolehan dan nilai penyusutannya setiap tahun untuk masing-masing aktiva tidak disajikan secara rinci di daftar aktiva tetap. Seharusnya BMT Islam Abdurrah Pekanbaru menyajikan jumlah unit, tahun perolehan dan harga perolehan setiap aktiva yang dimiliki.

Akumulasi penyusutan aktiva tetap harus dihitung sesuai dengan prinsip akuntansi, karena penyusutan ini akan berpengaruh kepada SHU yang akan diperoleh. Jika penyusutan dihitung terlalu besar akan menyebabkan SHU yang diperoleh menjadi kecil begitu juga sebaliknya jika penyusutan dihitung terlalu kecil akan menyebabkan SHU yang diperoleh akan lebih besar.

d. Kewajiban Lancar

1) Hutang Dana-dana

Hutang dana-dana dalam BMT merupakan hutang titipan sebesar Rp. 675.754.948,00. Dalam penyajian hutang dana-dana BMT tidak menyajikan secara jelas dana yang termasuk dalam hutang dana-dana sehingga akan terjadi kesulitan bagi pembaca untuk memahami penjelasan hutang tersebut.

e. Ekuitas

Modal sendiri yang merupakan hak dari anggota BMT dinilai berdasarkan setoran dari anggota. Penyajian modal sendiri terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: simpanan pokok, simpanan wajib, donasi gubernur Riau, cadangan, dan SHU berjalan. Sedangkan simpanan lain yang tidak berkarakteristik sebagai modal disajikan sebagai kewajiban lancar jika panjang waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun dan sebagai hutang jangka panjang jika lebih dari satu

tahun. Di dalam laporan perubahan ekuitas, SAK ETAP mewajibkan entitas untuk menyajikan informasi yang terdiri dari saldo laba pada awal dan akhir periode serta penyajian kembali laba setelah dikoreksi kesalahan atau perubahan kebijakan.

1. Laporan Perhitungan SHU

Pelaporan sisa hasil usaha yang dilakukan BMT dengan cara mengurangi pendapatan dengan biaya. Berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan BMT dan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum, maka penyajian perhitungan hasil usaha memuat pendapatan yang timbul dari transaksi anggota yang diakui sebagai partisipasi anggota yang dikurangi dengan beban pokok yang terjadi. Beban usaha dan beban perkoperasian (beban yang dikeluarkan tidak untuk kepentingan usaha BMT) disajikan terpisah dalam laporan perhitungan usaha.

Dari perhitungan hasil usaha yang dilakukan BMT dapat diketahui bahwa BMT menghitung SHU secara langsung. Total SHU tahun 2020 sebesar Rp. 142.568.513,00. Bentuk penyajian sisa hasil usaha yang dilakukan BMT dengan mengkalkulasikan seluruh pendapatan dari setiap unit yang kemudian akan diperoleh SHU kotor. SHU kotor kemudian dikurangkan dengan beban operasional untuk menghasilkan SHU Operasi. SHU Operasi akan ditambahkan dengan pendapatan diluar operasi dan kemudian dikurang dengan beban diluar operasi yang akan menghasilkan sisa hasil usaha tahu berjalan sebelum pajak.

Berdasarkan perhitungan SHU yang disajikan BMT dapat diketahui bahwa perhitungan SHU sesuai dengan SAK ETAP. Dimana pada perhitungan SHU

yang disajikan BMT mengelompokkan pendapatan dan beban yang dikeluarkan secara terpisah.

2. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut. Jumlah arus kas yang berasal dari kas yang berasal dari aktivitas operasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar. Laporan arus kas ini dapat disajikan dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung, pemilihan metode penyajian laporan arus kas disesuaikan dengan kondisi dan kinerja keuntungan perusahaan.

BMT Islam Abdurrah Kota Pekanbaru sudah memuat dan menyajikan laporan arus kas yang dilaporkan pada akhir periode akuntansi. Dimana laporan arus kas berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut.

Hal ini sesuai dengan SAK ETAP, dimana Laporan Arus Kas merupakan salah satu bagian laporan keuangan yang dilaporkan pada Laporan Keuangan BMT.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan fungsinya memberikan informasi tambahan mengenai pospos neraca dan pos-pos perhitungan hasil usaha maka catatan atas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kebijakan akuntansi dan penjelasan unsur-unsur laporan keuangan. Kebijakan akuntansi menyajikan tentang perlakuan akuntansi mengenai piutang, persediaan aktiva tetap dan pembagian SHU tahunan anggota, penjelasan unsur-unsur laporan keuangan terdiri dari penjelasan pos-pos neraca dan penjelasan pos-pos perhitungan hasil usaha.

Dalam laporan keuangan BMT Islam Abdurrab Kota Pekanbaru sudah tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga dapat diketahui kebijakan-kebijakan apa saja yang telah ditetapkan BMT, namun penyajian laporan keuangan BMT ini sering mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan salah satunya karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi cukup baik dan memiliki pemahaman terhadap standar akuntansi yang harus diterapkan di BMT. Menurut Pernyataan SAK ETAP, catatan atas laporan keuangan harus menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi diantaranya mengenai pengungkapan pendapatan dan beban sehubungan transaksi BMT dengan anggota serta dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada BMT Islam Abdurrab Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses akuntansi yang dilakukan di BMT Islam Abdurrab dimulai dengan pencatatan setiap transaksi ke buku kas yang kemudian dibuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan sisa hasil usaha, penyusunan neraca, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan kekayaan dan penyusunan catatan laporan atas laporan keuangan.
2. Pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan dalam BMT Abdurrab ini menggunakan prinsip *accrual basis*, yaitu dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadinya transaksi.
3. Dalam neraca pada unit simpan pinjam terdapat perkiraan piutang simpan pinjam. Dalam penyajiannya, BMT Abdurrab tidak menaksirkan akan terjadinya kerugian dalam piutang tersebut. Padahal, piutang yang diberikan mengandung resiko apabila anggota pindah ke daerah lain.
4. BMT Abdurrab sudah menyajikan catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas namun BMT Abdurrab belum menyajikan laporan perubahan kekayaan atau ekuitas.
5. Berdasarkan hasil penelitian diketahui BMT Islam Abdurrab Kota Pekanbaru dalam menerapkan akuntansi belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Karena piutang yang diberikan mengandung resiko maka disarankan kepada BMT untuk membuat taksiran akan terjadinya kerugian dalam piutang.
2. Disarankan kepada BMT untuk menerapkan akuntansi perkoperasian sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Riahi, Belkaoui, *Teori Akuntansi*. Buku Satu, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Bahri, S. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Baridwan Zaki, *Intennediate Accounting*. Edisi Tujuh, BPFE, Yogyakarta, 2012.
- Harahap Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Penerbit Rajawali, Jakarta, 2012.
- _____, *Teori Akuntansi*, Edisi Satu, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haryono, Jusup Al *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jilid Satu, Edisi Enam, Penerbit STIE YKPN, 2012.
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi BMT (Untuk Perguruan Tinggi)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.
- Ismail, 2013. *Perbankan Syariah*, edisi kedua Yogyakarta.
- Kartikahadi, Hans., dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Kieso Donald E., Jerry J. Weygandt, *Akuntansi Intermediate*. Jilid Satu, Edisi Ketujuh, Alih Bahasa Herman Wibowo, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta, 2014.
- Kusnadi, *Akuntansi Keuangan*. Edisi Pertama, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 2016.
- Kusnadi HMA, Liza L. Nurwulan, Nengah Sudjana, Edi Subiyantoro, S. Dewi. W, Dewi Nurjanah, Noor Shodiq A., Ahmad Huzaini, *Pengantar Akuntansi Keuangan I (Prinsip. Prosedur. dan Metode*, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 200014.
- Niswonger C. Rollin, Phillip E. Fess, Carls S. Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Jilid 1, Edisi Kesembilan Belas, Penerjemah Alfonsusu Sirait, Helda Gunawan, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Nourma, Dewi.2017. *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01 Februari–Juli.

Pandji Anoraga, Nanik Widiyanti, *Manajemen BMT Teori dan Praktek*. Edisi Pertama, Penerbit Pustaka Jaya, Semarang, 2016.

Raharjo Budi, *Aktiva dan Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan*. Edisi I, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2012.

Rianto, M. Nur. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.

Rivai Wirasmita, Ani Kenangasari, *Analisis Laporan Keuangan Koperasi*. Edisi Pertama, Penerbit Pioneer Jaya, Bandung, 2014.

Sukamdyo Ign, *Manajemen Koperasi*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

Talman Amidipradja R.H., Rivai Wirasmita H. R.A., *Neraca Koperasi*. Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 2014.

Tugiman Hiro, *Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2014.

Widiyanti Ninik dan Y.W. Sunindhia, S.H., *BMT dan Perekonomian Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Pemerintah RI, *Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2019.